

RAPAT KOORDINASI PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA (PTPD) e- KALIMANTAN TENGAH

Dalam rangka mengoptimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa agar dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bisa sesuai dengan amanat Undang – Undang, maka peran Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) ini sangat penting guna memperkuat desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga dalam rangka mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa” Kutipan sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Bapak Eka Dyan Satya Hadi, ST., M.Si selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembukaan kegiatan **Rapat Koordinasi Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) se – Kalimantan Tengah**.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penegasan peran dan fungsi PTPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengoptimalkan peran dari kecamatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga diharapkan PTPD dapat mempercepat perubahan untuk mengidentifikasi masalah dan pemecahan masalah yang lebih efektif yang dihadapi oleh desa dan terjalinnya hubungan konsultatif antara kepala desa dengan aparat kecamatan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun pelaksanaannya satu hari kegiatan, yaitu hari Selasa tanggal 24 Juli 2019 bertempat di Aula BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah jl. Diponegoro, Palangka Raya dengan tiga narasumber yang memamparkan materi terkait kegiatan ini dan dihadiri sebanyak 219 peserta yang terdiri dari camat, anggota PTPD yang sudah dilatih dan DPMD Kabupaten se – kalteng.



Salah satu narasumber saat memaparkan materi yang dipandu oleh moderator.

Materi yang disampaikan 1) Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Permendagri no. 20/2018, 2) Integrasi SISKEUDES sesuai Permendagri no. 20/2018, 3) Percepatan penyusunan produk hukum tentang daftar kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan 4) Evaluasi pendampingan PTPD di Provinsi Kalteng. Serta dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi hasil pelaksanaan Rakor PTPD se – Kalimantan Tengah.

Kegiatan pun ditutup oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bapak Eko Sulistiono, S.STP., M.AP.